

# PROSES TERBENTUKNYA PERMUKIMAN ETNIS DI KOTA PALEMBANG

Oleh

**Eni Hedayani<sup>1)</sup>, Muhammad Idris<sup>2)</sup>, Sukardi<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup> Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas PGRI Palembang

<sup>2</sup> Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas PGRI Palembang

## ABSTRAK

*Palembang adalah salah satu kota tua yang mengalami masa-masa perkembangan dari mulai sebagai kota tradisional, kota kolonial dan kota modern. Wujud dari perkembangan kota tersebut adalah eksistensi kampung-kampung etnis. Kampung etnis menjadi kajian yang menarik beberapa dekade ini karena kecenderungan kelompok etnis mempertahankan identitas budayanya secara spasial, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan proses terbentuknya kampung etnis di Kota Palembang. Penelitian ini adalah penelitian heuristik. Sumber data yang digunakan berupa sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber kuantitatif. Analisis data dilakukan melalui interpretasi dengan pendekatan spatial temporal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terbentuknya permukiman etnis di Kota Palembang adalah bertahap dari yakni tahap awal (infantil) ditandai dengan lokasi permukiman etnis tersebar dengan kesan terserak, tahap muda (juvenil ) ditandai dengan adanya pengorganisasian lokasi permukiman etnis berdasarkan ras dan kelas, tahap dewasa (mature) ditandai dengan adanya penghilangan dan atau perluasan lokasi permukiman etnis. Pada proses masing-masing tahapan dipengaruhi oleh morfologi kota dan politik pemerintahan yang berlaku.*

***Kata Kunci : Proses, Permukiman Etnis, Palembang***

## I. PENDAHULUAN

Terbentuknya permukiman pada kampung etnis merupakan konsekuensi dari interaksi kompleks berbagai aspek dan berbagai level. Interaksi yang kompleks tersebut menunjukkan hubungan/kaitan yang erat antara proses-proses sosial, ekonomi, budaya, teknologi dengan pola-pola keruangan yang tercipta. Pada level rumahtangga, kampung dan lokasi pilihan kelompok etnis menjadi kajian yang menarik karena terkait adanya variasi karakteristik masing-masing kelompok etnis yang berbeda satu dan lainnya. Permukiman terjadi karena terpusatnya aktivitas manusia untuk dapat mengakses sumber daya tertentu dan menjadikannya melakukan proses mukim.

Penentuan tempat tinggal untuk pertama kali bagi kelompok etnis merupakan tahapan awal yang cukup berat. Tidak semua kelompok etnis dapat mandiri dan bebas dalam menentukan tempat tinggal, beberapa cenderung mencari lingkungan yang setara dengan budayanya (Massey & Denton, 1988; Saltman, 1991 dalam Hedayani, 2015).

Sebaran kampung etnis erat kaitannya dengan lokasi relatif dari masing-masing tempat tinggal mereka. Ekspresi yang dimunculkan dari lokasi tempat tinggal etnis menciptakan suatu dimensi spasial. Hasil penelitian Reardon dan O'Sullivan (2004) menemukan 2 dimensi spasial dari sebaran permukiman etnis yaitu dimensi pengelompokan/kemerataan dan dimensi keterisolasian/ketermunculan. Deurlo & Musterd (2011) menyatakan bahwa terbentuknya variasi pola tersebut adalah konsekuensi dari adanya perbedaan lokasi tempat tinggal antara kelompok etnis minor dengan mayor. Selain itu, faktor sejarah, kebijakan politik, restrukturisasi perekonomian

dan konsep/sistem negara juga turut memberikan pengaruh terhadap ekspresi keruangan yang terbentuk..

Palembang memiliki variasi kondisi permukiman dan sosial budaya yang mempengaruhi variasi karakteristik dan sebaran kampung etnis. Hedayani (2015) menyatakan bahwa Palembang mempunyai karakteristik permukiman yang beragam, hal tersebut dapat dilihat dari tiga kondisi bangunan permukiman yang berbeda. Kondisi pertama, terdapat bangunan permukiman yang masih tradisional berbentuk rumah panggung yang berlokasi di sepanjang aliran Sungai Musi dan aliran anak Sungai Musi. Kondisi kedua, terdapat permukiman yang semi tradisional berbentuk semi rumah panggung yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang berlokasi di bagian tengah, dan kondisi ketiga adalah terdapat permukiman yang modern berbentuk rumah tunggal yang berfungsi sebagai rumah tinggal yang berada di bagian utara. Variasi kondisi permukiman tersebut merupakan cerminan adanya variasi budaya penghuni yang tentunya mempunyai konsekuensi terhadap perbedaan kecenderungan pemilihan lokasi tempat tinggal/hunian.

Heterogenitas penduduk secara horisontal yang terjadi di Kota Palembang tentunya menarik untuk dikaji, apabila dikaitkan dengan hasil temuan Reardon & O'Sullivan (2004) tentang dimensi segregasi (pemisahan) kampung etnis. Tentunya perbedaan budaya dan kondisi geografis akan sangat menentukan pembuktian ada tidaknya gejala pemisahan dari lokasi kampung etnis. Adanya variasi pola sebaran kampung etnis merupakan konsekuensi dari proses-proses politik, ekonomi, sosial, budaya, dan fisik yang terjadi di Kota Palembang. Kemampuan kelompok etnis dalam mengakses lokasi strategis adalah salah satu bentuk adaptasi di lingkungan Palembang. Tentunya gejala heterogenitas penduduk secara horisontal yang terjadi di Kota Palembang memerlukan kajian ilmiah untuk mengungkap kebenarannya. Penelitian ini mencoba untuk mengaplikasikan ilmu geografi didalam pengungkapan gejala tersebut dengan pertanyaan awal yang harus dijawab yaitu proses terbentuknya permukiman etnis.

Pentingnya mengungkap gejala yang peneliti uraikan sebelumnya adalah upaya pembenahan perencanaan lingkungan perumahan dan permukiman berbasis identitas kelokalan, seperti yang peneliti temui dilapangan bahwa walaupun tidak terjadi konflik antar kelompok etnis di Kota Palembang, namun eksistensi kelompok etnis terhadap lingkungan permukiman menciptakan pola-pola yang unik yang menarik untuk dipelajari.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Etnis**

Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 40 tahun 2008). Etnis berbeda dengan pengertian ras. Seperti yang diungkap oleh Coakley (2001) "...it refers to the cultural heritage of particular group of people". Etnis mengacu pada warisan budaya dari kelompok orang tertentu. Maguire, et al (2002) menjelaskan juga bahwa "the term ethnic become a precise word to use regarding people of varying origins". Jadi, istilah etnis menjadi sebuah kata yang tepat untuk memandang orang dari berbagai asal-usul. Lebih lanjut diungkapkan pula bahwa etnis mungkin dipertimbangkan dalam istilah kelompok apapun yang didefinisikan atau disusun oleh asal-usul budaya, agama, nasional atau

beberapa kombinasi dari kategori-kategori tersebut (Maguire, et al, 2002). Pengertian-pengertian etnis membentuk pengertian kelompok etnis

### b. Kampung Etnis

Kajian perumahan dan permukiman telah dipelajari dari berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu geografi. Sudut pandang ilmu geografi bersifat *human oriented*. Kaitannya dengan dengan perumahan etnis maka makna *human oriented* mencerminkan pengertian kampung selalu dikaitkan dengan eksistensi manusia sebagai subjek. Sebelum lebih jauh, akan dibahas terlebih dahulu konsep dari kampung secara umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) terdapat penjelasan mengenai definisi kampung, yaitu “kumpulan beberapa buah rumah; rumah-rumah tempat tinggal”

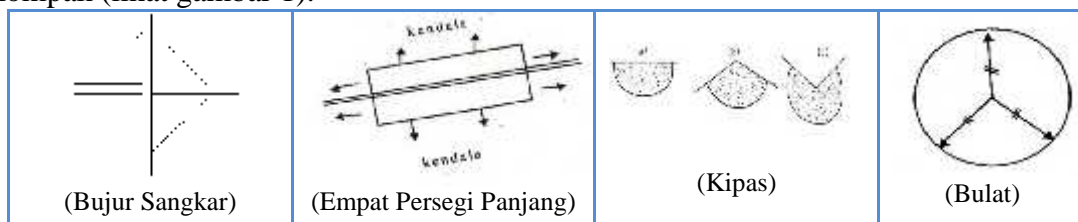
Definisi mengenai kampung yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut banyak kesamaannya dengan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli geografi perkotaan, yaitu kampung menunjukkan dua aspek penting. *Pertama*, kampung bermakna bangunan rumah tempat tinggal dari segi fisik bangunan. *Kedua*, menyangkut aspek persebaran baik sebagai bangunan rumah tunggal maupun kelompok bangunan rumah, serta lokasi bangunan rumah di perdesaan maupun di perkotaan.

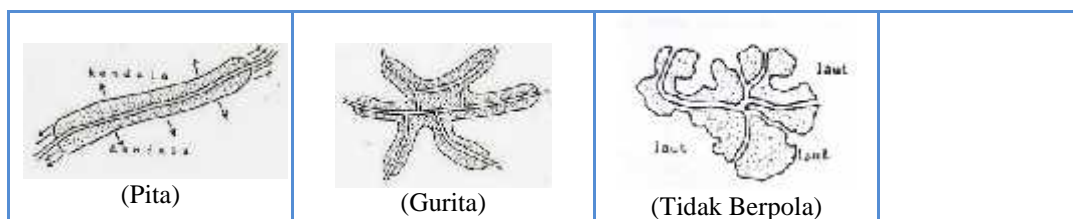
Pemaknaan kampung telah didefinisikan dari beberapa ahli menurut alasan-alasan yang berbeda. Pada penelitian ini fokus pemaknaan kampung dikaitkan dengan kebudayaan penghuninya (identitas etnis). kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil dan karyanya (Koentjaraningrat, 1985).

Kebudayaan terwujud melalui pandangan hidup (*world view*), tata nilai (*values*), gaya hidup (*life style*), dan aktivitas (*activities*) yang bersifat konkrit. Aktivitas inilah yang secara langsung akan mempengaruhi wadahnya, yakni lingkungan binaan yang diantaranya adalah rumah tinggal (Rapoport, 1969). Wadah dari kebudayaan yang dalam penelitian ini disebut sebagai kampung merupakan hasil dari kompleks gagasan yang tercermin pada pola aktivitas masyarakatnya. Kelompok-kelompok rumah (kampung) dapat dijadikan cermin suatu kebudayaan. Pemaknaan tersebut sejurus dengan ilmu geografi yang erat kaitannya dengan *human oriented* bahwa di perumahan atau di rumah tinggal, seseorang, keluarga, atau komunitasnya menghabiskan sebagian besar waktu selama hidupnya dan melaksanakan kegiatannya sebagai makhluk sosial.

### c. Proses Terbentuknya Kampung

Permukiman terjadi karena terpusatnya aktivitas manusia untuk dapat mengakses sumber daya tertentu dan menjadikannya melakukan proses mukim. Fenomena di perkotaan terbentuknya pola permukiman dihubungkan dengan kondisi morfologi yakni secara fisik yang tercermin pada penggunaan lahan, pola-pola jalan, dan tipe-tipe bangunan (Yunus, 2006). Ekspresi keruangan bentuk-bentuk permukiman perkotaan dikelompokkan menjadi dua yakni bentuk-bentuk kompak dan bentuk-bentuk tidak kompak (lihat gambar 1).





Gambar 1. Bentuk-bentuk kota kompak (sumber : Yunus, 2006)

Ekspresi keruangan yang menunjukkan bentuk-bentuk kompak umumnya terdapat 7 macam bentuk yaitu 1) Bentuk bujur sangkar, 2) Bentuk empat persegi panjang, 3) Bentuk kipas, 4) Bentuk bulat, 5) Bentuk pita, 6) Bentuk gurita, 7) Bentuk yang tidak berpola. Terciptanya ketujuh bentuk tersebut sangat menonjolkan peranan jaringan transportasi yang telah terencana dengan baik.

Pengamatan terbentuknya permukiman juga ditekankan oleh Taylor, Griffith yang menyatakan bahwa kota dapat diklasifikasikan berdasar pada karakteristik dinamika fungsionalnya. Adapun 4 macam tahap pertumbuhan kota yaitu :

#### *Tahap Awal (the infantil stage)*

Pada tahap ini belum terlihat adanya pemilihan yang jelas mengenai daerah-daerah permukiman dengan daerah-daerah perdagangan. Disamping itu juga belum terlihat adanya pemilahan kampung-kampung yang miskin dan kampung-kampung yang kaya serta bangunan-bangunan yang ada masih terserak di sana-sini tidak teratur. Jalan-jalan utama yang ada baru satu atau dua saja.

#### *Tahap Muda (the juvenile stage)*

Pada tahap ini mulai terlihat adanya proses pengelompokan pertokoan pada bagian-bagian kota tertentu. Rumah-rumah yang lebih besar dan lebih baik mulai bermunculan di bagian pinggiran dan sementara itu kompleks perpabrikasi mulai muncul di sana-sini.

#### *Tahap Dewasa*

Pada tahap ini mulai terlihat gejala-gejala *segregasi* fungsi-fungsi (pemisahan fungsi-fungsi dan kemudian mengelompokkan). Klas permukiman yang jelek terlihat dengan jelas perbedaannya dengan klas permukiman yang lebih baik. Ditinjau dari lokasinya, pola permukimannya dan struktur permukimannya, klas permukiman yang baik sangat jauh berbeda dengan klas permukiman yang jelek. Kaitannya dengan ini, ingat teori-teori pola keruangan kota yang dikemukakan oleh E.W. Burgess (*the concentric theory*), Homer Hoyt (*the sector theory*), dan Harris Ullman (*the multiple nuclei theory*). Daerah-daerah industri banyak terdapat pada lokasi-lokasi yang dekat dengan jalur perhubungan dan pengangkutan.

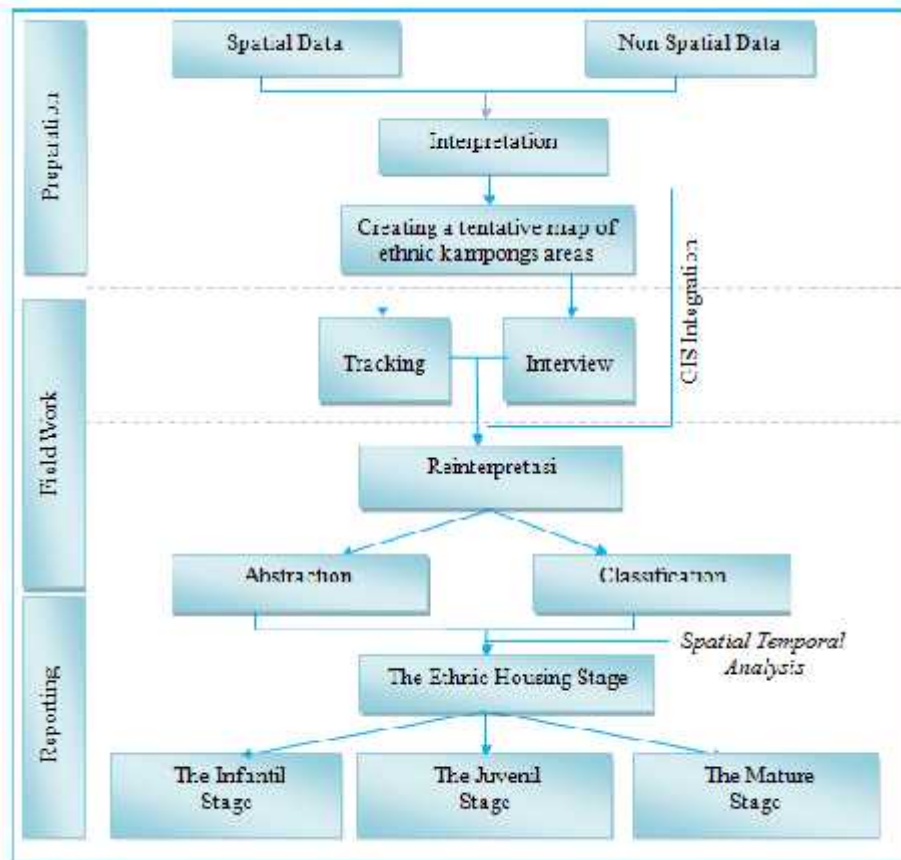
#### *Tahap Ketuaan*

Tahap ini ditandai oleh adanya pertumbuhan yang terhenti (*cessation of growth*), kemunduran dari beberapa distrik dan kesejahteraan ekonomi penduduknya menunjukkan gejala-gejala penurunan. Kondisi-kondisi ini terlihat di daerah-daerah industri seperti : *Land-Cashire, Yorkshire, dan Durham*

Memahami proses terbentuknya kampung etnis, setidaknya terdapat 4 faktor penting yaitu proses restrukturisasi ekonomi (*the economic restructuring process*), struktur negara kesejahteraan (*the structure of welfare state*), sejarah perkembangan kota (*the history of urban development*) dan kebijakan publik (*public policy*) (Deurloo & Musterd, 2001). Masing-masing faktor tidak dapat dijelaskan sendiri-sendiri karena saling mempengaruhi satu sama lain.

### III. METODE

Penelitian ini adalah penelitian heuristik dimana penelitian ini adalah penelitian awal untuk mengumpulkan berbagai sumber-sumber data yang terkait permukiman etnis di Kota Palembang. Sumber data yang digunakan terbagi dua yaitu sumber data spasial yaitu *Arsip Inventory Cartography Manuscript of Centuries 17-19*, Peta administrasi Kota Palembang (1:10.000, 2010), Quickbird Image 2010 (sheet kota Palembang). Selain itu dikumpulkan juga terkait sumber data non spasial berupa sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber kuantitatif tentang profil demografi dan kependudukan, lokasi kampung, matapencaharian, dan fungsi rumah. Analisis data dilakukan melalui interpretasi dengan pendekatan spasial temporal.



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami perkembangan embrio kota di bekas kota-kota tradisional di Indonesia khususnya Kota Palembang pada masa sekarang akan sangat sulit jika tidak terlebih dahulu memahami bagaimana kondisi permukiman di masa lalu. Perkembangan permukiman di suatu kota tidak terlepas dari perkembangan kota itu sendiri. Rentetan peristiwa yang terjadi pada perkembangan kota banyak ditinjau dari beberapa aspek salah satunya adalah aspek spasial-temporal.

Palembang adalah jenis kota yang kompak. Namun, berhubung ada perairan yang cukup lebar membelah kotanya, maka seolah-olah kota tersebut terdiri dari dua

bagian yang terpisah (*split cities*). Dua bagian ini dihubungkan oleh jembatan besar yakni jembatan Ampera. Selain kenampakan fisik kota yang kompak dan khas, kota ini juga merupakan *melting pot* sejak dahulu karena posisi strategis dan kekuatan politik pemerintahan terutama pada era Kerajaan Sriwijaya. Keunikan yang ada di kota ini sangat menarik untuk diteliti terutama kaitannya fenomena heterogenitas secara horisontal dimana beragamnya etnis penduduk yang menghuni kota ini. Tentunya penduduk pendatang membutuhkan ruang tempat tinggal untuk menyelenggarakan kehidupannya. Pilihan lokasi permukiman masing-masing dari mereka menunjukkan suatu proses adaptif yang sangat menarik untuk dikaji.

Tulisan ini menelaah perkembangan permukiman di Kota Palembang dengan mengkaitkan eksistensi permukiman etnis dengan periode waktu kolonial sampai pasca kolonial. Keunikan dari masing-masing periode ini adalah terdapat perbedaan kebijakan dalam pengelolaan permukiman yang berdasar pada motif-motif tertentu dimana berimbas pada konsep pembangunan Kota Palembang. *The present is the key to the past* adalah ungkapan yang tepat untuk membuka tabir masa lalu Kota Palembang. Hakikatnya adalah hasil permukiman di masa sekarang lebih pada persoalan waktu. Pembahasan permukiman Kota Palembang dengan ditinjau dari tiga periode waktu tersebut diharapkan memberikan kemudahan dalam memahami konteks permukiman pada periode-periode berikutnya khususnya terkait dengan eksistensi kelompok etnis di kota ini.

Selain dari periode waktu (temporal), pendekatan yang dilakukan untuk mengamati proses terbentuknya permukiman etnis berdasar pada teori klasifikasi Taylor, Griffith yang menekankan pengamatannya pada dinamika fungsional yang ada dari masa ke masa. Berdasarkan pengamatannya, terbentuknya permukiman kota dapat dikelompokkan menjadi empat tahapan yaitu tahap infantil (*the infantile stage*), tahap juvenil (*the juvenil stage*), tahap dewasa (*the mature stage*), dan tahap ketuaan (*the senile stage*). Namun demikian, karena situasi permukiman kota ini baru tahap dewasa (*the mature stage*) sehingga pembahasan terkait tahap keempat tidak dijelaskan karena akan menyimpang dari situasional yang sebenarnya. Teori ini menjadi dasar bagi peneliti untuk pengamatan proses terbentuknya permukiman etnis di Kota Palembang dimana sebaran lokasi permukiman di kota ini sangat erat dipengaruhi oleh aspek politik pemerintahan dan morfologi. Pertimbangan pemerintahan dari tiap-tiap periode memberi rasa tersendiri bagi perkembangan permukiman yang berimbas pula pada eksistensi permukiman etnis pendatang.

### **Tahap awal (*the infantile stage*)**

Tahap pertama adalah tahap awal (*the infantile stage*). Pada tahap ini dicirikan oleh pemilihan daerah permukiman belum terlihat jelas. Sebelum, pembahasan pada kondisi awal (*the infantile stage*), akan dibahas singkat terkait bentuk morfologi kota Palembang, kota ini yang mencirikan kota terbelah (*split cities*) dimana terdapat hambatan fisik yaitu sungai mengesankan kota ini seolah-olah terbagi menjadi dua bagian. Kehidupan sungai menjadi orientasi utama masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupannya. Rumah mereka memiliki fungsi ganda yakni sebagai tempat tinggal, tempat berdagang, dan alat transportasi. Lokasi mereka bermukim adalah di sepanjang aliran sungai besar yang disebut Sungai Musi.

Penjelasan mengenai kondisi fisik Kota pada tahap ini direpresentasikan pada era Pra Hindu Budha. Tanjung (2006) menyebutkan bahwa menurut Jau-Ju Kua Kota Palembang pada era Hindu Budha dikelilingi oleh tembok batu. Kemungkinan raja dan

para bangsawan bertempat tinggal di dalamnya, sedangkan rakyat biasa berdiam di atas rakit beratap rumbia yang ditambatkan di tepi sungai. Umumnya bangunan di Ibu Kota terbuat dari kayu dimana kota ini sendiri terkenal sebagai penghasil kayu. Hal inilah menyebabkan mengapa tidak ditemukan sisa-sisa bangunan-bangunan permukiman di peninggalan pra Hindu Budha dan membuat para ahli jarang mengulas tentang kondisi fisik Kota.

Kehidupan Hindu Budha pada saat itu direpresentasikan oleh kekuatan Sriwijaya. Namun demikian, Sriwijaya harus berakhir ketika arogansi untuk melakukan perluasan wilayah kekuasaan sulit untuk dibendung. Kemunduran ini terjadi salah satunya adalah karena Sriwijaya tidak selalu berhasil mengekspansi wilayah karena tidak mempunyai hubungan yang baik dengan rezim-rezim kuat lainnya. Taal (2003) menyatakan bahwa peperangan yang terus menerus dilakukan oleh Sriwijaya menjadi penyebab mundurnya kekuatan Sriwijaya dan pada akhirnya Majapahit menaklukkan Sriwijaya yang kemudian terbentuklah Kerajaan Palembang.

Kerajaan Palembang pada awalnya menempati daerah yang bernama Kuta Gawang sebagai pusat pemerintah (Hanfiah, 1987). Kuta Gawang adalah bangunan benteng Kerajaan Palembang yang terletak di Seberang Ilir dan menghadap ke Sungai Musi. Pertahanan di benteng ini sangat berlapis dimana pada masing-masing pertahanan terdapat susunan tiang kayu yang memagarinya. Hanfiah menyatakan bahwa Kuta Gawang merupakan Kota yang dilindungi oleh kuto. Kuto adalah pagar dinding tinggi. Orang-orang asing bermukim di Seberang Ulu, Sungai Musi. Mereka adalah orang-orang Portugis, Belanda, Cina, Melayu, Arab, Campa, dan lainnya. Lokasi dari permukiman orang asing ditempatkan di seberang ulu dengan alasan khusus, namun demikian ketegasan akan lokasi tempat tinggal mereka masih bersifat tidak memaksa. Mereka dapat berpindah tempat kecuali tidak boleh naik kedaratan. Cerminan dari Kuta Gawang adalah cerminan dari tipikal kota zaman madya. Kesan dari permukiman etnis adalah tidak teratur karena memang belum ada pembagian zona secara tegas terkait lokasi permukiman, lokasi perdagangan, dan sebagainya.

Pengetahuan tentang kondisi Permukiman pada zaman Kuta Gawang ini amat sangat terbatas. Tidak ada naskah Palembang yang menjelaskan bentuk dan isi Kuta Gawang kecuali peristiwa peperangan tahun 1659 di Kuta Gawang oleh VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) akibat dari perselisihan diantara hubungan VOC dan Kerajaan Palembang. Hancurnya Kuta Gawang menandakan berakhirnya Kerajaan Palembang. Pada tahun 1960 lokasi di sekitar Kuta Gawang dibuka dan dibangun untuk pendirian pabrik pupuk yaitu Pupuk Sriwijaya. Pada waktu pembangunan banyak ditemukan balok-balok kayu bekas dinding kuto, juga temuan lain. Namun, pada waktu itu perhatian terhadap nilai sejarah masih rendah, sehingga temuan-temuan tersebut tidak diperdulikan. Data ini menjadi informasi awal bahwa lokasi bangunan di darat untuk pertama kali berada di sekitar kompleks PT Pusri atau secara administratif terletak di kelurahan I ilir, Kecamatan Ilir Timur II walaupun seperti apa bentuk dan isinya sulit untuk diketahui.

Hancurnya Kuta Gawang berdampak besar pada sistem perwilayah kota ini. Setidaknya terdapat dua hal penting dari peristiwa hancurnya Kuta Gawang yakni pertama adalah berakhirnya eksistensi Kerajaan Palembang yang digantikan oleh sistem pemerintahan Kerajaan Palembang Darrusalam, dan kedua adalah terjadinya pemindahan pusat pemerintahan dan permukiman penduduk ke arah yang lebih ke hulu, yang terletak di antara Sungai Rendang dan Sungai Tengkuruk. Pemindahan terjadi

karena kondisi Kuta Gawang yang hancur dan sangat buruk akibat perang sehingga ada perasaan ketidaknyamanan untuk dibangun atau ditinggali kembali.

### **Tahap Juvenil (*the juvenile stage*)**

Tahap kedua adalah tahap juvenile dimana pada tahap ini merupakan fase remaja dimana kota sudah mulai dibagi menjadi zona-zona seperti perumahan atau pabrik dalam skala kecil. Kerajaan Palembang yang telah ditumbangkan oleh kolonial belanda menyebabkan dua peristiwa penting seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pasca peristiwa tersebut Kolonial Belanda dengan kekuatan politisnya membentuk Kesultanan Palembang Darusalam. Periode ini dianggap sebagai titik awal terjadinya pembangunan modern di Kota Palembang. Hal tersebut terlihat dari bangunan-bangunan monumental oleh Sultan Machmud Badaruddin I (1741-1757) seperti Masjid Agung Palembang, Makam Lemabang (Kawah Tengkreng), Keraton Kuto Besak, dan kanal-kanal di wilayah kesultanan, yang berfungsi sebagai pencipta interaksi dibidang pelayaran, pertanian, dan pertahanan.

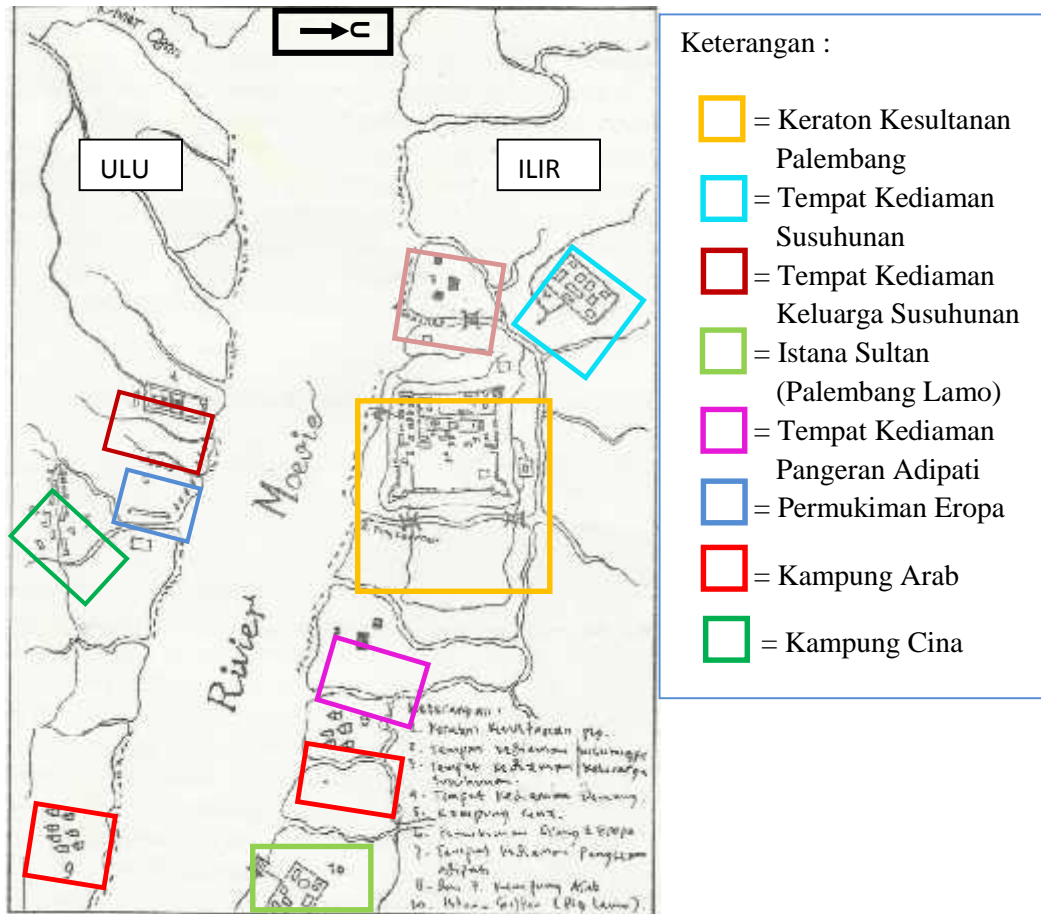
Kekuatan sultan banyak direpresentasikan dengan adanya bangunan benteng yang terbuat dari batu. Munculnya bangunan batu di Palembang pada masa kesultanan menjadi salah satu acuan untuk melihat perbandingan kemajuan kota Palembang dari periode sebelumnya. Selain itu, bangunan batu ini dapat juga menjadi simbol petunjuk untuk menjelaskan kondisi Permukiman pada saat itu terkait stratifikasi masyarakat Kota Palembang. Sevenhoven (1997) menyatakan bahwa hanya seorang raja yang memiliki hak untuk menghuni gedung yang terbuat dari batu. Sedangkan, kelompok golongan ningrat memiliki hak istimewa untuk menghuni rumah yang dibangun dengan kayu besi dan tembesu. Dua kayu tersebut merupakan jenis kayu yang mahal. Golongan ningrat disini adalah mereka para priyayi keturunan raja-raja atau kaum ningrat.

Selain dua kelompok tersebut, rakyat yang khusus tinggal di Kota Palembang disebut *miji*. Umumnya kelompok *miji* adalah mereka yang bekerja di sektor-sektor industri dan mereka tunduk di bawah kekuasaan. Tapi, tidak semua kelompok *miji* adalah bawahan, adapula yang menjadi atasan dalam artian mereka adalah ketua kelompok dari para pengikut *miji* dengan jumlah besar atau yang disebut sebagai *alingan* (Tanjung, 2006). Perumahan kelompok ini berada tidak menentu sesuai dengan pekerjaannya, karena keterbatasan referensi untuk merepresentasikan lokasi perumahan sehingga tidak banyak ahli membahas terkait lokasi perumahan *miji*.

Pada tahap ini permukiman etnis sudah diatur melalui pengorganisasian permukiman berdasarkan ras. Dampak dari aturan ini adalah penempatan lokasi yang didasarkan pada ras etnis dari pendatang tersebut. Pada gambar 1 dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengelompokan permukiman berdasarkan ras. Pada bagian seberang Ilir terdapat permukiman khusus bagi tempat tinggal susuhunan, tempat tinggal keluarga susuhunan, kampung arab, tempat tinggal adipati, dan kampung cina. Sedangkan pada bagian seberang Ulu terdapat tempat tinggal kediaman susuhunan, permukiman eropa, kampung cina, dan kampung arab. Aturan ini berlaku untuk mengatur penduduk asing yang datang ke kota ini. Penduduk asing turut merepresentasikan simbol dari stratifikasi. Sebagian besar dari mereka datang ke kota ini adalah untuk berdagang dengan berbagai jenis komoditas sejak abad ke-17 dan ke-18. Mereka bertempat tinggal di sepanjang Sungai Musi, kecuali orang Arab. Permukiman penduduk asing adalah berupa rumah rakit yaitu rumah yang berada di atas air. Terdapat alasan dari kesultanan mengapa bangsa asing mendiami rumah rakit yakni adalah upaya pertahanan apabila bangsa asing dianggap mengancam maka dengan



mudah akan dihanyutkan rumahnya. Rumah rakit menjadi simbol pembeda antara penduduk Kota Palembang dengan penduduk asing. Orang Arab seperti yang disinggung pada uraian sebelumnya adalah penduduk asing yang tidak tinggal di rumah rakit, alasannya adalah lebih didasarkan atas kesamaan agama dan pengetahuan baca tulis agama dan tradisi islam.

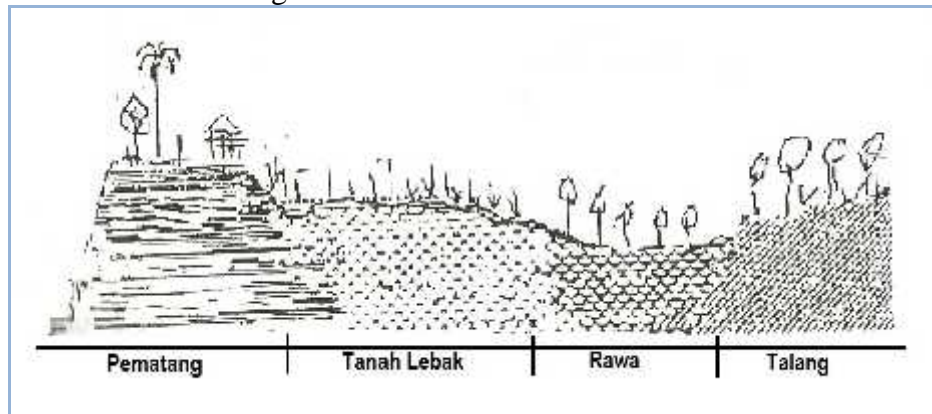


Gambar 3. Sebaran permukiman menurut kelompok etnis pada periode Kesultanan (sumber : Arsip Inventory Cartography Manuscript of Centuries 17-19, disalin oleh Ari (2002), dengan modifikasi peneliti, 2014)

### Tahap Dewasa (*the mature stage*)

Tahap ketiga adalah tahap mature yang merupakan tahap kota dewasa yang dicirikan dengan adanya perumahan, zona komersil, dan zona industri kota adanya tata ruang yang jelas menandakan kematangan sebuah kota di setiap sisi. Kota Palembang pada tahap ini sudah merepresentasikan suatu perwilayah kota yang didasarkan pada fungsi dan morfologi kota. Zed (2003) menyatakan sebagian besar dataran Kota Palembang terdiri dari kawasan hutan basah dan payau. Kondisi tanah di sebagian besar kota bersifat selalu basah dan rawan banjir. Oleh karena itu, matapencaharian penduduk kota ini lebih bersifat non agraris, karena untuk matapencaharian agraris tidak mendukung dengan kondisi tersebut. Sungai-sungai yang mengalir di dataran kota yang rendah membentuk kantong-kantong lahan sebagai kelompok permukiman tempat tinggal penduduk untuk menyelenggarakan kehidupannya. *Profiling* dari kota ini terdiri

tanah pematang, lebak, rawa, dan talang (lihat gambar 4). Masing-masing tanah mencerminkan variasi ekologis.



Gambar 4. *Profiling* wilayah Kota Palembang bagian Seberang Ilir  
(sumber : Zed, 2003)

Pematang adalah tanah-tanah sempit yang terletak di sepanjang tepi sungai dengan lebar bervariasi mulai 50-300 m. Fungsi dari pematang adalah sebagai tempat tinggal utama penduduk. Letak tanah pematang relatif tinggi dari permukaan air sungai, namun daerah pematang tetap rawan terhadap ancaman banjir. Saat curah hujan tinggi dan menyebabkan naiknya air sungai, maka air sungai dapat meluap dan mengalir sampai ke tanah lebak. Limpasan yang terperangkap di tanah lebak dapat memberikan berkah berupa aneka jenis ikan air tawar.

Rawa memiliki karakter yang mirip dengan tanah lebak, hanya saja rawa hampir selalu tergenang air sepanjang tahun. Rawa secara kasat mata hampir mirip dengan danau-danau kecil. Rawa juga banyak berisikan ikan air tawar, sehingga rawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar. Terakhir adalah tanah talang. Tanah talang adalah tanah yang relatif tinggi dibanding tanah lebak dan rawa. Tanah talang identik dengan lahan kering sehingga potensial sebagai lahan pertanian yang subur.

Variasi kondisi tersebut setidaknya menjadi dasar bagi pemerintah kolonial untuk mengkonsep modernitas di kota ini. Mereka menginginkan konsep pembangunan yang lebih berorientasi kota daratan. Namun, karena kondisi fisik kota ini sangat basah sehingga menyulitkan bagi pemerintah ini untuk mengkonsep kota daratan karena mereka sulit menentukan lokasi yang tepat untuk dibangun kawasan perkantoran, kawasan perdagangan, dan sebagainya. Sebenarnya sebelum kekuasaan diambil alih oleh kolonial, pada zaman kesultanan telah dimulai pembangunan di daratan kota ini terutama di daerah pematang. Bangunan-bangunan tersebut kemudian di alih fungsikan oleh kolonial untuk ditempati sebagai tempat tinggal, dan sebagainya sebagai tempat pertahanan. Salah satu simbol modernitas pada periode ini yang paling mencolok adalah pembangunan menara air pada tahun 1929. Bangunan ini ada salah satu dari bentuk perhatian pemerintah kolonial terhadap kondisi kesehatan. Mereka menganggap kualitas air bersih di kota ini sangat rendah, sehingga bangunan menara air berfungsi sebagai tempat sumber air bersih.

Selain pembangunan menara air, pemerintah kolonial juga mempunyai keinginan pembangunan di daratan yang dapat memberikan segala fasilitas kehidupan yang lebih modern, sayangnya keterbatasan dana menjadi kendala bagi bangsa ini untuk membangun kota. Adapun simbol-simbol modernitas lainnya pada masa ini adalah pada

tahun 1927 dilakukan pengaspalan jalan sepanjang 20 km, dibangunnya tempat berpesta (*societeit*) dan gedung pertunjukkan/teater (*schouwburg*) sebagai simbol eksklusifitas bangsa ini (Tanjung, 2006). Pembangunan jalan dan gedung di kota ini memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari Jawa sebagai buruh bangunan. Saat itu banyak golongan Jawa kelas menengah kebawah datang ke kota ini untuk bekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan dan gedung. Kedatangan golongan Jawa ini setidaknya menambah daftar heterogenitas penduduk yang mengisi ruang Kota Palembang

Tanjung menambahkan bahwa Pembangunan oleh kolonial ini secara umum tidak semua berhasil, di beberapa lokasi terdapat penolakan dari kelompok pribumi misalnya pembangunan jalan kampung di 4 Ulu. Mereka menganggap dengan dibangunnya jalan akan memudahkan aksesibilitas orang-orang asing keluar masuk kampung. Hal inilah adalah bentuk dari kecurigaan masyarakat terhadap aktivitas orang asing yang di lingkungan mereka.

Modernisasi yang dilakukan pemerintah kolonial tampaknya belum banyak merubah rona kota ini menjadi lebih modern. Perkembangan infrastruktur di kota ini masih kalah jauh dengan Padang dan Medan. Infrastruktur yang dibangun masih terkonsentrasi di pusat kota dan di daerah kediaman bangsa barat yakni di sekitar daerah Talang Semut. Dimenangkannya wilayah Kesultanan Palembang oleh Kolonial Belanda pada tahun 1821 tidak hanya berdampak pada situasi politik, tetapi mempengaruhi juga kondisi perkembangan wilayah Kota Palembang. Kolonial Belanda yang saat itu berkuasa melakukan pembongkaran Istana Kesultanan menyita perumahan yang dihuni oleh para priayi. Istana Kesultanan dihancurkan isinya dan diubah fungsi menjadi tempat tinggal sekaligus menjadi benteng kolonial (Tanjung, 2006). Benteng ini didiami oleh Mayor Jendral De Kock dan pasukan militernya. Perumahan di sekitar lingkungan keraton yang dihuni oleh para priayi diambil alih dan ditempati oleh para perwira belanda. Para priayi selanjutnya pindah mukim tidak jauh dari kraton tepatnya di sekitar kampung 27 dan 28 ilir.

Tanjung (2006) dalam tesisnya menyatakan bahwa pada masa pemerintah kolonial belanda terdapat pembagian permukiman penduduk berdasarkan sistem patronase atau dikenal sistem *guguk*. Penduduk kota dibagi menjadi dua kelompok yakni *miji* dan *alingan*. Diantara dua kelompok ini diawasi atau dilindungi oleh pelindungnya yaitu priayi. Aktivitas mereka adalah memproduksi barang-barang kerajinan atas perintah priayi, sehingga situasi yang terbentuk pada masa itu adalah permukiman berdasarkan ikatan pelindung dan bersifat sektoral. Kampung-kampung yang dibentuk ini direpresentasikan melalui penamaannya, misalnya *Sayangan* yaitu kampung dimana penghuninya sebagian besar adalah pembuat produk dari tembaga dan perak. Selain penamaan kampung yang disesuaikan pada pekerjaan penghuninya, Kolonial Belanda juga membuat nama-nama kampung dengan angka/bilangan dan menambahkan lokasi distrik dari kampung tersebut, contohnya kampung 3 Ilir yang artinya kampung tersebut bernomor 3 dan terletak di Kota Palembang bagian Ilir.

Selain penduduk pribumi kota, penduduk dari bangsa asing pun mengalami hal yang sama. Namun terdapat sedikit perubahan seperti etnis Tionghoa dan Arab. Etnis Tionghoa yang pada awalnya menghuni rumah rakit di perairan Sungai Musi sudah banyak beralih ke hunian daratan. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan kolonial yang membebaskan golongan ini untuk membangun rumah di daratan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperluas area perdagangan sampai ke pedalaman Kota Palembang, sehingga pada masa itu banyak ditemui perumahan etnis ini di berlokasi di dekat pasar. Bangsa Asing lain seperti Arab,

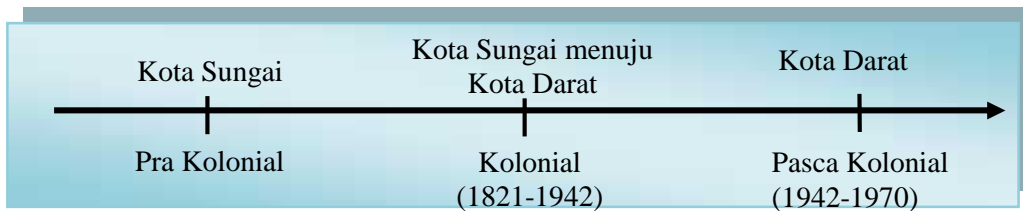
memiliki perekonomian yang lebih baik dari etnis Tionghoa, karena memang sejak awal diberikan tempat istimewa di daratan maka pada masa ini, etnis Arab tidak berpindah tempat melainkan memodernisasi bangunan rumah mereka ke bentuk-bentuk rumah batu dan rumah limas yang mewah.

Kesan yang muncul dari pandangan dan pengalaman kolonial belanda selama menyelenggarakan hidup di Kota Palembang adalah dasar bagi para perencana kolonial untuk mengembangkan wilayah Kota Palembang. Mereka menganggap terdapat kesamaan antara karakter Kota Palembang dengan Kota Venesia. Hal pokok kesamaan Kota Palembang dengan Kota Venesia adalah keterikatan penduduk Palembang dengan lalu lintas perairan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar daerah Palembang terletak di kawasan dataran rendah dengan beberapa sungai besar dan sungai kecil yang mengalir sampai ke pantai timur Pulau Sumatera, maka dari itu ketergantungan masyarakat pada lalu lintas perairan sungai sangatlah tinggi.

Pada masa transisi dari kolonial ke pasca kolonial membuat situasi kota ini terancam. Penguasa kolonial yang saat itu berkuasa meninggalkan kota ini karena desakan dari lawannya terutama pribumi yang ingin memerdekakan diri. Kesempatan ini dijadikan pribumi elit untuk mengambil alih kembali wilayah-wilayah yang didiami oleh kolonial, selain itu pribumi elit juga menjadi kuasa di bidang perdagangan dan politik.

Sementara, pada saat bersamaan beberapa kelompok utusan keamanan Indonesia yang saat itu telah merdeka dikirim ke kota ini sebagai alat administrasi dan keamanan. Kelompok tersebut antara lain adalah pegawai, polisi dan militer. Jumlah mereka yang tidak menjadikan permasalahan sendiri bagi pemerintah lokal terutama untuk menyediakan tempat tinggal. Permukiman bekas kolonial belanda yang kosong tidak dapat menampung jumlah utusan ini. Sampai pada akhirnya diputuskan bahwa pemerintah yang baru harus segera membangun perumahan yang baru bagi kebutuhan tempat tinggal para utusan.

Setiap penguasaan yang baru terhadap daerah tentunya akan berimbas pada kebijakan yang akan diterapkan di daerah tersebut. Pemerintah yang baru tampaknya masih berjalan di koridor kolonial dengan melanjutkan konsep pembangunan kota daratan. Keterbatasan kondisi fisik Kota Palembang yang berupa rawa dan sungai adalah menjadi kendala bagi kota ini untuk perluasan pembangunan jalan darat pada periode kolonial. Sampai pada penguasaan Jepang, terjadi pembangunan yang cukup memberi pengaruh pada perkembangan daratan kota ini (lihat gambar 5).



Gambar 5. Arah konsep Kota Palembang periode Pra Kolonial-Pasca Kolonial

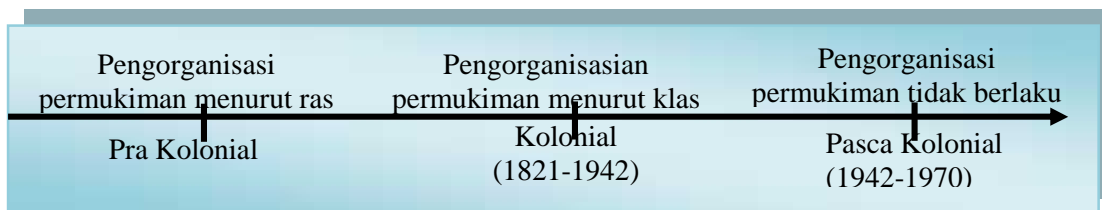
Perbedaan konsep kota yang berkembang di kota ini setidaknya menjadi evolusi bagi kota dari kota yang awalnya berkonsep kota sungai menuju kota yang berkonsep darat. Perubahan ini terutama terjadi ketika masa pemerintahan Jepang. Jepang dalam penguasaannya berhasil memperluas jalan sampai bagian utara kota yakni dari Masjid Agung sampai Rs. Charitas (Tanjung, 2006). Setidaknya dengan adanya jalan tersebut memberi bangkitan bagi masyarakat Kota Palembang untuk

memanfaatkan aksesibilitas jalan untuk kepentingan memperluas perdagangan dan jasa. Hanafiah (1998) dalam Tanjung menyatakan bahwa beberapa bangunan di sepanjang jalan tersebut antara lain terdapat Pasar Cinde (dibangun sekitar tahun 1950-an), Toko Gaya Baru, dan Sumatera *Shopping Center* pada tahun 1970-an. Selain itu terdapat pula 4 pasar yang dibangun dalam waktu yang bersamaan yakni Pasar Kertapati, Pasar Lemabang di 3 ilir, Pasar Buah, dan Pasar Kuto di Kuto Batu.

Dampak dari jalan yang dibangun jepang secara *massive* benar-benar merubah orientasi masyarakat kota ini ke darat. Kelancaran aksesibilitas dalam perluasan perdagangan membuat rona kota lebih terkesan modern. Saat itu, masyarakat kota sudah beralih ke moda transportasi darat baik berupa becak, sepeda, dan mobil.

Berbeda dengan periode sebelumnya, arahan permukiman pada periode ini menunjukkan hilangnya sekat-sekat menurut golongan-golongan masyarakat tertentu untuk dapat menempati ruang di Kota Palembang. Peranan penguasa yang memerintah Kota Palembang menjadi faktor utama terhadap arahan permukiman. Selama berabad-abad masyarakat yang menghuni kota ini terbatas ruang gerak untuk beraktivitas. Sampai pada berpulangnya kolonial belanda dari tanah Palembang setidaknya melunturkan kondisi tersebut, selain itu transformasi demografi dan perekonomian Palembang yang terus membaik juga memicu permintaan akan perumahan menjadi meningkat, sehingga akses ke lokasi strategis tidak lagi berdasarkan golongan tertentu, tetapi lebih kepada daya beli masyarakat.

Meningkatnya jumlah penduduk pada awal kemerdekaan mendorong kebutuhan perumahan yang sangat tinggi. Sementara, ketersediaan bangunan perumahan masih sangat minim di kota ini. Taal (2003) memperkirakan jumlah penduduk saat itu adalah 283.000 jiwa. Transformasi sosial dan perekonomian kota di masa transisi setidaknya membawa pengaruh usaha pemerintah saat itu untuk menjawab tantangan kebutuhan perumahan. Bangkitan yang terjadi karena adanya perluasan jalan ke utara kota membuat penduduk kota terkonsentrasi di area tersebut. Karena hal itulah maka daerah-daerah permukiman baru di bangun di sekitar area jalan yang dilengkapi fasilitas perdagangan modern. Pada masa ini, sistem permukiman tidak terorganisasi berdasarkan ras dan kelas seperti pada pemerintahan sebelumnya. Transformasi perekonomian dan tidak ada aturan yang membatasi golongan tertentu untuk meningkatkan perekonomiannya adalah pemicu lunturnya kebijakan tersebut (perhatikan gambar 6)



Gambar 6. Arahan permukiman Kota Palembang periode Pra Kolonial-Pasca Kolonial

Masyarakat bersaing secara sehat, tidak terkecuali di daerah Kuto Batu. Kuto Batu yang saat itu didominasi oleh keturunan Arab membuka ruang perumahannya untuk golongan lain. Pembangunan Pasar Kuto di Kuto Batu setidaknya menjadi bangkitan bagi daerah ini untuk memiliki area perdagangan sendiri. Adanya pasar memicu terbentuknya perumahan baru. Aktivitas di pasar tidak hanya terbatas oleh golongan Arab dan pribumi saja, Tionghoa yang saat masa kolonial telah mendapatkan

akses memperluas perdagangannya juga melibatkan diri di lingkungan Kuto Batu khususnya dalam aktivitas perdagangan dengan membangun rumah toko (ruko) di dekat pasar.

Adanya pasar di Kuto Batu setidaknya menuntut adanya perbaikan jalan. Aktivitas perekonomian yang semakin berkembang di Kuto Batu pada akhirnya membuat pemerintahan meloloskan untuk membangun jalan di sekitar lingkungan tersebut sekitar tahun 1980-an. Pada akhirnya Kuto Batu menjadi salah satu lokasi yang ramai terutama dengan adanya pelabuhan Bom Baru yang menjadi salah satu tren mark kota ini. Pelabuhan ini sebenarnya telah mengalami pergeseran lokasi dimana tergantung dari penguasaan pemerintahan saat itu. Pelabuhan telah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya.

Catatan sejarah dari situs *palembangport.co.id* menyatakan bahwa pada awalnya pelabuhan ini terletak di hulu tepian sungai Tangga Buntung (situs Kerajaan Sriwijaya), selanjutnya berabad-abad kemudian yaitu pada tahun 1821 Pelabuhan pindah ke Boom Jati di depan Benteng (Rumah Sakit AK. GANI sekarang). Pada tahun 1914 pindah lagi ke Hilir yang sekarang disebut Gudang Garam. Barulah pada tahun 1924 lokasi Pelabuhan dipindahkan ke Boom Baru (dekat Kuto Batu) sampai saat ini, yang pengukuhan wilayahnya ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1924 dalam Staatblad Nomor 545 tahun 1924. Fungsi-fungsi pasar, pelabuhan, dan jalan adalah simbol dari modernitas Kota Palembang ditengah-tengah masyarakat yang majemuk. Tentunya, kondisi sekarang pun pada abad ke-20 fungsi-fungsi tersebut masih menjadi penentu perkembangan wilayah kota ini terutama terhadap perumahan. Perubahan konsep kota yang terjadi di kota ini seiring waktu merubah pula perkembangan fisik kota. Perkembangan Kota Palembang banyak dipengaruhi oleh ide-ide yang terus berkembang pada tiap periode penguasaan. Berubahnya orientasi kehidupan masyarakat Kota Palembang yang awalnya terkenal sebagai masyarakat sungai berubah menjadi masyarakat yang berorientasi pada kehidupan darat. Pada saat sekarang pun kesejahteraan masyarakat Kota Palembang juga diidentikan dengan lokasi tempat tinggal. Masyarakat yang memiliki lokasi rumah dekat dengan sungai dipandang sebagai masyarakat dengan kesejahteraan rendah, sedangkan masyarakat yang berada di lokasi menjauhi sungai diidentikan dengan masyarakat yang memiliki kesejahteraan tinggi.

## V. PENUTUP

Hasil penelitian terkait proses terbentuknya permukiman etnis di Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa terbentuknya permukiman etnis di Kota Palembang melalui 3 tahap yaitu tahap awal (*the infantile stage*) yang ditandai dengan pemilihan daerah permukiman etnis belum terlihat jelas, Tahap muda (*the juvenile stage*) ditandai dengan permukiman etnis terkelompok berdasar ras dan kelas dalam skala kecil, dan tahap dewasa (*the mature stage*) ditandai dengan tahap yang dicirikan terjadinya perluasan dan atau penghilangan dari masing-masing lokasi permukiman etnis yang terkelompok sebelumnya. Masing-masing tahap dipengaruhi oleh morfologi fisik kota dan politik pemerintahan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ari. Kemas. 2002. *Masyarakat Tionghoa Palembang : Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*. Palembang : CV Erliza
- Coakley. 2001. Ethnic Concentration Areas In Neighbourhood Perspective in Enschede, The Netherlands. *Indonesia Journal of Geography*, Vol 45, No 2, p 135-148
- Deurloo & Musterd. 2001. Residential Profiles of Surinamese and Moroccans in Amsterdam. *Urban Studies*, Vol 38, No 3.
- Hanafiah, Djohan. 1987. *Kuto Gawang: Pergolakan dan Permainan Politik dalam Kelahiran Kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang: Pariwisata Jasa Utama
- Heldayani, Eni. 2015. Pola Sebaran Perumahan Etnis di Kelurahan Kuto Batu, Kota Palembang. *Majalah Geografi Indonesia* Vol 29 No 1, Maret 2015
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1985. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Maguire, et al. 2002. *Sports World : A Sociological perspectiv*. Champaign, IL : Human Kinetics
- Rappoport, Amos. 1969. *House Form and Culture*. London: Prentice Hall.
- Sevenhoven, J.L. Von. 1971. *Lukisan tentang Ibu Kota Palembang (terjemahan Soegarda Poerbakawatja)*. Jakarta: Bhratara.
- Tanjung, Ida Liana. 2006. Palembang dan Plaju : Modernitas dan Dekolonisasi Perkotaan Sumatera Selatan Abad ke-20. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Yunus, Hadi Sabari. 2006. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Zed, Mestika. 2003. *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*. Jakarta : LP3ES